

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

Tio Nurwani Br. Tambunan¹⁾, Toti Indrawati²⁾, Yusni Maulida³⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: tio.nurwani4757@student.unri.ac.id

Analysis The Effect of Labor Force Participation Rate (LFPR) and Open Unemployment Rate (OUR) on Poverty levels in Riau Province

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Labor Force Participation Rate and Open Unemployment Rate on poverty in Riau Province. Data that uses is time series data in 2004-2020. Analysis of the data in this study using a multiple linear regression method with Eviews 10. The result of the testing has been done, individual regression test showed that Labor Force Participation Rate has no significant on poverty levels of Riau Province, but the Open Unemployment Rate have a significant and positive effect on poverty levels of Riau Province. The entire regression test showed that all independent variables have a significant effect on the dependent variable. The magnitude of the effect caused by the two independent variables together on the dependent variable of 0,766050 that mean is 77%, while the remaining 23% is influenced by other variables not examined in this study. Advice to the Government for tackling the poverty problems with upgrade the education or skills to upgrade their productivity. Additionally, government should to expand the investment for expand the jobs too.

Key Words : Labor Force Participation Rate, Open Unemployment Rate, Poverty.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses bergerak ke arah yang lebih baik, selalu bertujuan untuk membuat masyarakat adil, kompetitif, maju, dan sejahtera. Perkembangan pasti akan mengarah pada setiap tahap yang membawa tujuan ini semakin dekat. Simatupang dan Saktyanu dalam Saputra (2011) memaparkan bahwa pembangunan tersebut wajib dilaksanakan secara terpadu dan *continue* sesuai dengan prioritas dan kebutuhan tiap daerah melalui pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Penurunan jumlah penduduk miskin termasuk ke dalam salah satu indikator yang harus dicapai oleh pembangunan nasional.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih harus menghadapi tingginya tingkat kemiskinan di seluruh lapisan masyarakat. Indonesia ditetapkan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar se-ASEAN dan ke-4 terbesar didunia, jumlah penduduk negara kepulauan ini pada tahun 2020 mencapai 271 juta jiwa..

Kemiskinan termasuk masalah yang serius dan sudah lama mengendap di masyarakat Indonesia. Kemiskinan tidak dilihat hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dapat dilihat dari sisi sosial seperti dari segi penyebab dan dampak yang ditimbulkan. Timbulnya masalah sosial seperti kebodohan, pengangguran, perselisihan, kurangnya higienitas, kematian ibu dan anak, putus sekolah, tingginya tingkat kriminalitas merupakan akibat dari masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu dinamika sosial ekonomi yang digambarkan oleh terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan (Todaro dan Smith, 2009)

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah yang serius. Selama ini, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya belum mencapai tujuannya, dan banyak program pemberdayaan masyarakat miskin yang dinilai gagal mencapai tujuannya. Misalnya, meski pertumbuhan ekonomi tinggi, masalah kemiskinan belum terselesaikan. Padahal, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja. Provinsi Riau adalah salah satu dari Provinsi yang dikenal dengan Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah, tingginya jumlah penduduk, pengelolaan pemerintah dalam pembangunan yang cukup baik dan memiliki kemajuan cukup pesat, namun jumlah penduduk miskin di Provinsi ini terbilang relatif besar.

Dalam pengukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan adanya usaha dalam pendekatan ini, kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan juga kebutuhan dasar bukan makanan yang pengukurannya dilihat dari sisi pengeluaran. Jadi, pengertian penduduk miskin yang digunakan Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran untuk konsumsi perkapita perbulannya berada dibawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2020), menetapkan Garis Kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar Rp.544.057,- per kapita per bulan.

Kemiskinan juga dapat ditinjau dari sisi ketenagakerjaan. Pada dasarnya,

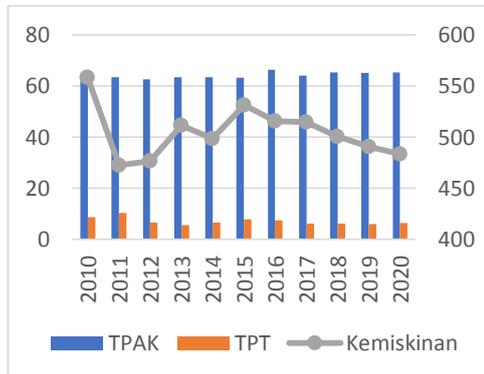
seseorang yang bekerja memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan sehingga mampu mencapai kemakmuran atau memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Ketenagakerjaan dapat menjadi sumber masalah kemiskinan sehingga pemerintah harus terus mengupayakan peningkatan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Menurut Mala (2017), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan gambaran besarnya penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Semakin tinggi partisipasi angkatan kerja maka akan semakin sedikit penduduk miskin. Kemampuan kerja seseorang secara langsung mempengaruhi pendapatan yang akan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan maka akan menyebabkan tingkat pengangguran yang meningkat. Pengangguran juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi kemiskinan karena tingkat pendapatan menjadi unsur penentu kesejahteraan penduduk. Secara umum pengertian pengangguran adalah seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan masih aktif dalam mencari kerja. Pengangguran bisa bertambah dikarenakan bertambahnya angkatan kerja baru setiap tahun sedangkan tenaga kerja yang terserap pasar tenaga kerja tidak ikut bertambah. Pertambahan pengangguran tentunya dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat sehingga menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Persentase partisipasi angkatan kerja dan pengangguran di Provinsi Riau mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini tidak sinkron dengan fluktuasi yang terjadi pada jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Riau. Hal tersebut tergambar pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1 Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Riau, 2021

Dari gambar 1 diatas bisa kita lihat bahwa pada tahun 2011, 2014 dan 2020 terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang seharusnya mengakibatkan peningkatan jumlah kemiskinan, namun kenyataannya adalah jumlah penduduk miskin itu sendiri mengalami penurunan yang signifikan. Sedangkan di tahun 2012 hingga tahun 2013 kita melihat keadaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami penurunan tetapi jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan, yang seharusnya apabila pengangguran berkurang maka akan berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan. Selanjutnya pada tahun 2011 terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semestinya mengakibatkan peningkatan pada jumlah penduduk miskin namun kenyataannya jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut juga mengalami penurunan yaitu dari 558 ribu jiwa penduduk miskin pada tahun 2010 menjadi 472,45 ribu jiwa penduduk miskin pada 2011. Hal yang sama kembali terjadi pada tahun 2014, 2017 dan 2019 dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan namun jumlah penduduk miskin juga ikut menurun.

Memutuskan rantai kemiskinan

sangat penting karena kemiskinan berdampak pada isu-isu yang berhubungan dengan kemanusiaan contohnya seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, dan pekerja anak (Yacoub, 2012). Todaro (2009), mengatakan salah satu mekanisme paling bagus agar kemiskinan berkurang adalah dengan menanggulangi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Barika (2013) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera menyimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Puspita (2015) yang menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. selanjutnya ada Yunita (2019) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran terbuka dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan hasil bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh pada kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sedangkan pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam periode 2010-2020, jumlah kemiskinan di Provinsi Riau mengalami penurunan. Tetapi tidak diimbangi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami fluktuasi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Todaro dan Smith (2009), menulis dalam bukunya "*Economic Development*" (Edisi ke-11) bahwa kemiskinan merupakan dinamika sosial ekonomi yang dicirikan oleh fakta bahwa pada pertumbuhan ekonomi tidak merata. Sajogyo juga mengemukakan pandangannya sendiri tentang kemiskinan, yaitu kemiskinan sebagai standar hidup di bawah kebutuhan hidup minimum, yang ditentukan berdasarkan kebutuhan pangan pokok yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja secara memadai, dan berdasarkan pada kebutuhan beras dan gizi (Girsang, 2015). Hal ini sejalan dengan pandangan Kuncoro yang mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimal (Zurisdah, 2016).

Soemitro dalam Girsang (2015) menunjukkan bahwa kemiskinan ditandai dengan standar hidup yang rendah dan depresi atau tertekan. Hal tersebut merupakan akibat dari serangkaian ketidaknormalan dalam proses mempertimbangkan kondisi dasar dan kerangka masyarakat itu sendiri, yang melibatkan beberapa hal, yaitu:

- a. Status faktor produksi tersedia sebagai sumber daya alam, modal, dan keterampilan. Dapat dikatakan bahwa masih kurangnya keterampilan di negara berkembang termasuk Indonesia
- b. Akibat kepincangan di sektor ekonomi, permodalan, dan penggunaan teknologi, di masa lalu, sebagian besar insentif diterapkan di beberapa sektor tertentu (sektor perkebunan dan pertambangan).

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis (Suryawati, 2015) yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah berkaitan erat dengan kelangkaan sumber daya

alam dan infrastruktur umum, serta kondisi tanah yang tandus.

- b. Kemiskinan buatan atau kemiskinan yang disebabkan oleh ulah manusia ini akibat dari modernisasi atau sistem pembangunan yang menghalangi masyarakat untuk mengontrol sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian relatif antara lain :

- a. Kemiskinan Relatif adalah kondisi dimana belum terjangkaunya semua lapisan masyarakat akibat dampak dari kebijakan pembangunan sehingga terjadi ketimpangan pendapatan
- b. Kemiskinan Absolut ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan perumahan dan pendidikan.

Kemiskinan tentunya tidak semata-mata hadir begitu saja. Penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yang dikemukakan oleh Sharp dalam Girsang (2015) antara lain:

1. Kemiskinan adalah hasil dari pola kepemilikan sumber daya yang tidak merata dan menyebabkan distribusi pendapatan yang juga tidak merata. Masyarakat miskin memiliki sumber daya yang terbatas dengan kualitas yang rendah.
2. Kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah akan mengakibatkan produktivitas yang rendah dan berdampak pada upah yang rendah. Kondisi ini disebabkan oleh pendidikan yang rendah dan kesialan.
3. Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan akses modal.

Keterbatasan aset atau modal bisa menyebabkan kemiskinan. Keterbatasan modal yang dimiliki masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dikemukakan oleh Suryawati (2005) sebagai berikut:

- a. *Natural assets* yaitu seperti tanah dan air, sebageian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan untuk mata pencahariannya yang kurang memadai.
- b. *Human Assets* : kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dibanding masyarakat kota.
- c. *Physical Assets* : akses infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan masih minim.

Teori Kemiskinan

Menurut Todaro (2009), salah satu mekanisme utama untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengurangi pengangguran dan masalah ketenagakerjaan. Pengangguran sering menjadi masalah dalam perekonomian karena mengakibatkan berkurangnya produktivitas dan pendapatan masyarakat sehingga timbul kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya (Mankiw, 2000). Ketiadaan pendapatan akan mendorong para penganggur untuk mengurangi pengeluaran konsumsi sehingga pengeluaran mereka berada di bawah garis kemiskinan (Sukirno, 2006).

Kemiskinan tidak semata-mata hanya dapat dipandang dari sisi ekonomi. Sen (dalam Riva, 2014) menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari pendapatan yang rendah (*low income*). Kemiskinan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi masalah kemanusiaan seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kriminalitas, kekerasan, putus sekolah dan anak jalanan. Banyak aspek yang terkait erat dengan kemiskinan, sehingga bersifat multidimensi. Jika seseorang mengalami “*capability deprivation*” dan ia

mengalami kurangnya kesempatan serta rasa aman, dan kesempatan tersebut membutuhkan pendidikan, sedangkan rasa aman membutuhkan kesehatan, maka orang tersebut miskin.

Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan dapat diukur melalui Badan Pusat Statistik dengan menggunakan metode kebutuhan dasar (*basic needs*) yang diukur dengan menggunakan angka atau indeks perkepala (*Head Count Index*), yaitu jumlah dan presentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Masyarakat miskin adalah mereka yang rata-rata pengeluaran bulanan per kapita di bawah garis kemiskinan. Tingkat Garis kemiskinan yang sebenarnya selalu konstan secara riil sehingga kemajuan penanggulangan kemiskinan dapat diupayakan setiap saat untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Rumus penghitungan garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2021):

$$GK = GKM + GKNM$$

Dengan nilai 2100 kkalori per kapita per hari merupakan pengeluaran minimum kebutuhan makanan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM). Komoditi kebutuhan dasar makanan ini diwakili 52 jenis komoditi. Untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan merupakan kebutuhan minimum dari Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang diwakili oleh komoditi kebutuhan dasar nonpangan dengan nilai 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Oleh karena itu, penduduk yang pengeluaran per kapita perbulannya di bawah garis kemiskinan diklarifikasikan sebagai masyarakat miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini mengindikasikan besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Badan Pusat Statistik (2021) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan dampak dari semakin besar jumlah angkatan kerja dan sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja semakin kecil jumlah angkatan kerja sehingga persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengecil. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) :

- a. Jumlah penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga. Faktor ini memiliki hubungan negatif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Artinya, semakin besar penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka semakin kecil Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
- b. Banyaknya jumlah penduduk muda atau usia sekolah juga mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) karena mereka umumnya mempunyai tanggung jawab yang kecil untuk mencari nafkah dan harus bersekolah.
- c. Semakin tinggi upah yang ditawarkan, maka akan semakin banyak anggota keluarga yang masuk ke dalam pasar kerja sehingga mengakibatkan nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi.
- d. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang maka akan

semakin besar pula keinginan untuk terjun ke dalam pasar tenaga kerja.

Hubungan TPAK dan Kemiskinan

Menurut Rowntree dalam Basorudin *et al.* (2019), ketenagakerjaan dipercaya menjadi jalan keluar terbaik dari situasi kemiskinan. Banyaknya tenaga kerja yang aktif dalam bekerja bisa meningkatkan pendapatan yang mempengaruhi meningkatkan pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluar dari kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran mengacu pada situasi dimana seseorang dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Dari sudut pandang individu, pengangguran ini menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Minimnya pendapatan menyebabkan penganggur mengurangi pengeluaran konsumsinya (Sukirno, 2004). Pengangguran biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka sendiri menurut Badan Pusat Statistik (2021) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran dan Badan Pusat Statistik (2021) menggunakan rumus :

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Hubungan TPT dan Kemiskinan

Sukirno (2006) menyebutkan bahwa pengaruh buruk dari pengangguran yaitu dapat membuat pemasukan masyarakat menjadi kurang dan dapat mengurangi level

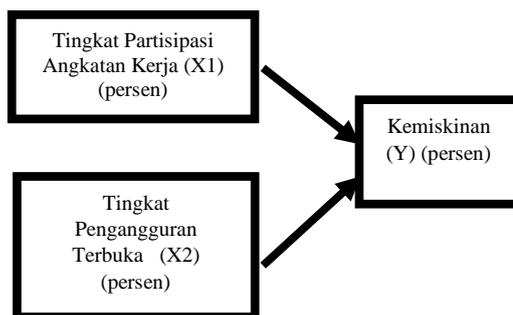
kesejahteraan yang telah di peroleh. Menurunnya kemakmuran masyarakat karena pengangguran dapat dipastikan bisa menaikkan peluang terjebak pada masalah kemiskinan karena tidak adanya pemasukan.

Menurut Todaro (2009), salah satu cara atau mekanisme yang utama dalam mengurangi kemiskinan dengan menanggulangi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan. Pengangguran berarti tidak memiliki pendapatan sementara tetap memiliki pengeluaran sehingga mereka harus menekan angka konsumsi menjadi dibawah pengeluaran minimum atau dibawah garis kemiskinan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan selaku variabel terikat dipengaruhi oleh dua variabel bebas yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Kerangka pemikiran dapat digambarkan secara skema seperti berikut ini :

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat sementara mengenai adanya suatu hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan teori dan penelitian yang ada maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini karena penulis melihat Provinsi Riau sebagai provinsi yang memiliki kemajuan pesat dan sumber daya manusia yang banyak. Akan tetapi Provinsi Riau juga memiliki penduduk miskin yang relatif besar. Dengan kemajuan tersebut seharusnya sumber daya manusia yang terserap pasar tenaga kerja bisa lebih banyak lagi sehingga penduduk miskin di Provinsi Riau dapat berkurang. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau periode 2004 – 2020.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data *time series* dengan waktu periode tahun 2004 – 2020. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan. Data penelitian diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sesuai dengan permasalahan. Data-data sekunder yang diperoleh dari publikasi

website resmi Badan Pusat Statistika Provinsi Riau.

Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel yang terdiri dari satu variabel terikat (*Dependent Variable*) yaitu Tingkat Kemiskinan dan dua variabel bebas (*Independent Variable*) yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Agar pengujian lebih akurat maka saya menggunakan bantuan *software Eviews 10* untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. *Software Eviews* sangat baik dalam melakukan uji-uji statistik terkait data *time series*.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Agar pengujian lebih akurat maka saya menggunakan bantuan *software Eviews 10* untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. *Software Eviews* sangat baik dalam melakukan uji-uji statistik terkait data *time series*. Persamaan regresi berganda yang dipakai adalah sebagai berikut (Soelistyo, 2001):

$$\hat{Y} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

\hat{Y} : Kemiskinan (%)

X_1 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

X_2 : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

b_0 : Konstanta

b_1 : Koefisien Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

b_2 : Koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka

e : *Error Term*

Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran dalam penelitian ini terhadap asumsi klasik model regresi. Pelanggaran terhadap asumsi klasik akan menyebabkan koefisien-koefisien regresi memiliki standar error yang besar dan hasil statistik tidak akurat. Model regresi yang baik adalah tidak akan menyebabkan pelanggaran terhadap asumsi klasik, adapun yang termasuk dalam uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2002).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu adanya hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen dalam persamaan regresi. Adanya multikolinearitas dalam model persamaan regresi yang digunakan pada penelitian akan mengakibatkan ketidakpastian estimasi, sehingga mengarahkan kesimpulan menerima hipotesis nol. Hal ini menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak signifikan dan standar deviasi sangat sensitif terhadap perubahan data (Gujarati, 2006)

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan adanya varians yang tidak konstan. Yang diharapkan pada model regresi adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Basuki, 2016).

4. Uji Autokorelasi

Menurut Gujarati (2004), autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Dalam model regresi linier klasik mengasumsikan

bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam distorsi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji *Breusch-Godfrey*.

Uji Statistik

Penelitian ini menggunakan uji statistik sebagai berikut:

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen (Basuki, 2016). Uji F ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Adapun kinerja pengujian sebagai berikut :

- Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi (negatif/positif) variabel dependen secara signifikan.
- Apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$ artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen (Basuki, 2016). Adapun kriteria pengujian sebagai berikut:

- Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- Apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (*Adjusted-R²*)

Koefisien determinasi (*Adjusted-R²*) mengukur seberapa jauh kemampuan model yang digunakan pada penelitian ini dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai koefisien determinasi kecil, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Basuki, 2016).

4. Koefisien Korelasi (r)

Koefisien korelasi (r) berfungsi untuk mengukur derajat keeratan antara dua variabel. Koefisien korelasi ini sebagai ukuran kekuatan hubungan linear di antara kedua variabel Y dan X (Basuki, 2016).

HASIL PENELITIAN

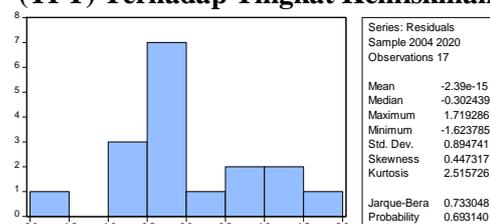
Berikut ini dapat dilihat ringkasan hasil olahan data penelitian dengan menggunakan software *Eviews-10*:

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa nilai *probability Jarque-Bera* sebesar $0,693140 > 0,05$, artinya residual data penelitian terdistribusi secara normal.

Gambar 3 Uji Normalitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan



Sumber: *Olahan Eviews-10*

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	70.11983	1302.877	NA
TPAK	0.013320	964.4989	3.171111
TPT	0.027348	38.54602	3.171111

Sumber : Olahan *Eviews 10*

Hasil diatas menunjukkan bahwa nilai *Centered VIF* baik X_1 maupun X_2 adalah 3,171111 dimana nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas atau tidak ada korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2 Uji Heteroskedastisitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.634339	Prob. F(2,14)	0.2302
Obs*R-squared	3.217822	Prob. Chi-Square(2)	0.2001
Scaled explained SS	2.516138	Prob. Chi-Square(2)	0.2842

Sumber : Olahan *Eviews 10*

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *Glejser*, nilai probabilitasnya sebesar 0,2001 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian atau tidak adanya penyimpangan asumsi klasik.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 3 Uji Autokorelasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.877339	Prob. F(2,12)	0.4409
Obs*R-squared	2.168683	Prob. Chi-Square(2)	0.3381

Sumber : Olahan *Eviews 10*

Dari hasil uji autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa prob 0,3381 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Berganda Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau 2004-2020

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.97524	8.373758	2.266036	0.0398
TPAK	0.211496	0.115412	1.832527	0.0882
TPT	0.412656	0.165374	2.495297	0.0257

	Mean dependent var	S.D. dependent var	Akaike info criterion	Schwarz criterion	Hannan-Quinn criter.	Log likelihood	F-statistic	Prob(F-statistic)
R-squared	0.795293	9.237059	2.907751	3.054788	2.922366	27.19529	1.287599	
Adjusted R-squared	0.766050	1.977567				0.000015		

Sumber: Olahan *Eviews 10*

Berdasarkan hasil regresi dari tabel diatas maka, persamaan regresi linier berganda diperoleh sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 18,97524 - 0,211496 X_1 + 0,412656 X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut, terlihat bahwa nilai variable terikat (Y) akan ditentukan oleh variable bebas (X_1 , X_2).

1. Nilai konstanta = 18,97524 nilai ini berarti jika semua variable bebas (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka) sama dengan nol atau dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*) maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 18,97524 persen.
2. Nilai koefisien regresi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_1) memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,211496.
3. Nilai koefisien regresi Tingkat Pengangguran Terbuka (X_2) memiliki koefisien positif sebesar 0,412656.

Uji Statistik

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5 Uji F Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan

<i>F-Statistic</i>	<i>Prob(F-Statistic)</i>
27.19529	0.000015

Sumber : Olahan *Eviews 10* (Diolah)

Pada tabel diatas terlihat nilai Prob. (F-Statistik) sebesar 0,000015 < 0,05, artinya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bersama-sama mempengaruhi Tingkat Kemiskinan secara signifikan.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6 Uji t Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
TPAK	-0.211496	-1.832527	0.0882
TPT	0.412656	2.495297	0.0257

Sumber : Olahan *Eviews 10* (Diolah)

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien regresi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki nilai prob sebesar $0,0882 > 0,05$ maka, variable Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien regresi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki nilai prob sebesar $0,0257 < 0,05$ maka, variable Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, disaat terjadi kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10%, maka mampu menaikkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 4,12656 persen dengan catatan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sama dengan nol atau dianggap konstan (*Ceteris Paribus*).

Hasil Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 7 Koefisien Determinasi Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan

<i>R</i>	<i>R-Square</i>	<i>Adjusted R-Square</i>	<i>S.E. of Regression</i>	<i>Durbin-Watson</i>
0,87524	0,795293	0,766050	0,956518	1,287599

Sumber : Olahan *Eviews 10* (diolah)

Dari data diatas diketahui nilai *Adjusted R-Squared* (R^2) sebesar 0,766050, artinya variasi seluruh variable bebas dapat mempengaruhi variable teikat sebesar 77% (0,766050). Sedangkan sisanya sebesar 23% (0,23395) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Hasil Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi dalam penelitian ini dapat dicari dengan rumus $R = \sqrt{R^2} = \sqrt{0,766050} = 0,87524$, maka hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan berhubungan sangat kuat secara positif karena nilai 0,87524 mendekati 1.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau

Pada uji F diketahui bahwa hasil dari penelitian, F-Statistik adalah 0,000015 ini lebih kecil dari 0,05 jadi, dengan demikian variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka terbukti secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Riau. Begitu juga pada hasil koefisien korelasi pada hasil penelitian diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,87524 yang berarti antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka erat hubungannya dengan kemiskinan karena koefisien yang diperoleh mendekati 1. Berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,766050 yang berarti, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka mempengaruhi kemiskinan sebesar 77% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model yang digunakan dalam penelitian.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan probabilitas uji parsial dari *level of significant* dan koefisien Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bernilai positif, dengan signifikan 0,0882 ini lebih besar dari 0,05 maka, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Demikian, hipotesis yang menyatakan ada pengaruh negatif dan signifikan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (X1) dan Kemiskinan (Y) ditolak. Hasil analisa regresi ini sangat berbeda dengan teori Todaro yang menyatakan bahwa salah satu mekanisme yang utama penanggulangan kemiskinan adalah dengan mengatasi masalah ketenagakerjaan dan

pengangguran. Dalam teori ini disebutkan bahwa angkatan kerja yang tinggi akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang memiliki arti tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Tenaga kerja yang diwakili oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 0,1193. Hal tersebut bertolak belakang dengan hipotesis peneliti dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat mengurangi kemiskinan. Tidak signifikannya pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga terjadi pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rasyadi (2011) di Indonesia dan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2020) di Sumatera Utara.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, tidak berpengaruhnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Provinsi Riau disebabkan oleh penduduk yang bekerja lebih didominasi yang memiliki pendidikan terakhir SD dan SMP. Rendahnya pendidikan tentu akan berdampak pada produktivitas. Semakin sedikitnya masyarakat yang produktif akan menghasilkan output rendah sehingga berdampak kepada pendapatan perkapita yang rendah. Oleh sebab itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau karena rendahnya pendapatan tentu akan mengakibatkan rata-rata pengeluaran penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diiringi dengan bertambahnya lapangan kerja yang tersedia hanya akan meningkatkan pengangguran yang juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Selain dari sisi pendidikan, pekerjaan utama penduduk Provinsi Riau adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Nilai koefisien regresi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2) memiliki tingkat signifikan 0,0257 nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y). Sedangkan nilai koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,412656 nilai ini berarti setiap peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10% sedangkan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_1) sama dengan nol atau dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan (*Ceteris Paribus*), maka kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 4,127%. Begitu juga sebaliknya, apabila Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 10% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dianggap konstan atau sama dengan nol, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 4,127%.

Hasil regresi linier berganda pada penelitian ini menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Sehingga ketika terjadi kenaikan pada pengangguran maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan di Provinsi Riau yang artinya pengangguran memberikan dampak buruk berupa turunya jumlah pendapatan masyarakat dan mempengaruhi kesejahteraan. Turunya kesejahteraan masyarakat akibat menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sukirno (2004), mengatakan ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur mengurangi pengeluaran untuk konsumsi sehingga pengeluaran mereka berada di bawah pengeluaran minimum atau garis kemiskinan yang mengakibatkan mereka terjebak di dalam kemiskinan. Pengangguran dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan

pendidikan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kerja yang dibutuhkan (*Mismatch*).

Pengangguran mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Riau karena besarnya pengangguran pada penduduk dengan pendidikan terakhir SMA yang cenderung memilih pekerjaan yang akan mereka lakukan. Penduduk dengan pendidikan terakhir SMA tentunya berumur diatas 17 tahun yang rata-rata sudah akan memiliki kehidupan terpisah dengan kedua orang tua nya atau akan memiliki keluarga baru. Rendahnya produktivitas dapat membawa keluarga mereka kedalam jurang kemiskinan. Pengangguran di Provinsi Riau juga didominasi oleh laki-laki yang mana seharusnya menjadi kepala keluarga atau bertugas mencari nafkah. Kepala keluarga yang pengangguran akan membuat anggota keluarga perempuan ikut terjun ke pasar tenaga kerja walaupun dengan upah yang rendah untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan konsumsi paling minim.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan di Provinsi Riau sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salam (2019) di Jawa Tengah dan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2020) di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Todaro yang mengatakan salah satu mekanisme yang utama dalam mengurangi kemiskinan adalah menanggulangi masalah tenaga kerja dan pengangguran. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa tingginya angkatan kerja akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang memiliki arti tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) akan mendorong berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sehingga mengurangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan hipotesis peneliti dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti, jenis pengangguran di Provinsi Riau digolongkan pada jenis pengangguran Friksional dimana pengangguran ini terjadi karena penganggur yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Terbukti dengan tingginya angka pengangguran yang disumbangkan oleh penduduk dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) yang cenderung melakukan seleksi terhadap pekerjaan yang akan dijalani. Berbeda dengan penduduk dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang cenderung tidak memiliki atau mau melakukan pekerjaan apapun untuk menghasilkan pendapatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan penduduk sehingga produktivitas mereka juga rendah dan berdampak pada upah yang rendah.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau yang disebabkan oleh tingginya angka pengangguran laki-laki yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga dan tingginya angka pengangguran dengan pendidikan terakhir SMA.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Riau bersama pihak-pihak terkait lainnya dapat membuat program-program pelatihan untuk peningkatan kompetensi penduduk khususnya yang akan masuk pasar tenaga kerja.
2. Pemerintah Provinsi Riau bersama pihak-pihak terkait lainnya untuk memperluas investasi agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3. Pemerintah Provinsi Riau bersama pihak-pihak terkait perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pengentasan kemiskinan sehingga program tersebut tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Barika, Barika. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Prngangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi se-Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, Volume 5 (1) ISSN 1979-7338*.
- Basorudin, M., Heryanti, R., Humairo, N., Putro, A., dan Firdani, A.. 2019. Gambaran Sektor Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, Volume III Nomor 2 ISSN Online 2549-2284*
- Girsang, Silviene. 2015. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Provinsi Riau. *Jom FEKON Vol. 2 No.2*.
- Hidayat, Muhammad. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan Tahun 2004-2012. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin.

- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi: Edisi Ke empat*. Jakarta: Erlangga.
- Puspita, D. W. 2015. Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK Journal of Economic and Policy*, 8 (1): 100-107.
- Rasyadi, Anwar. 2011. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Riva, Vinny Alvionita. 2014. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Riau Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. *JOM FEKON* Vol.1 No.2.
- Salam, U. K. 2019. Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Terhadap Kemiskinan. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Saputra, W. A. 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Sembiring, F., Tarmizi., Rujiman. 2020. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. *Serambi Engineering*, Volume V, No.2 Hal: 974-984.
- Soelistyo. 2001. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Pertama*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryawati, Chriswardani .2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK* Vol. 08, No.03
- Todaro, M.,P., dan S., C., Smith . 2009. *Pembangunan Ekonomi Edisi Ke Sebelas Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, Tulus Tahi H. 2008. *Pembangunan Ekonomi & Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yacoub, Yarlina. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos* Vol.8, No.3 Hal: 176-185.
- Yunita, Pretty. 2019. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja, Pengangguran Terbuka dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Surabaya: Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga.
- Zurisdah, Zahra. 2016. Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. Banten: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultas Maulana Hasanuddin.